

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, USIA PERUSAHAAN,
KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
KORPORASI (TKPIK) BERBASIS WEBSITE**

Oleh

Tristan Lizikri Maulana

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT***The Influence Of Ownership Structure, Company Age, Audit Committee Characteristics, And Company Size On The Level Of Website-Based Corporate Information Disclosure (TKPIK) Compliance*****By****TRISTAN LIZIKRI MAULANA**

The purpose of this research is to analyze the influence of ownership structure, company age, audit committee characteristics, and company size on the Level of Corporate Information Disclosure Compliance (TKPIK) Based Website. The data in this research are annual reports of companies in the trade, services and investment sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021 period as well as the Indonesian Stock Exchange website. The sampling method uses the method purposive sampling A sample of 164 companies was obtained. Hypothesis testing in this research uses multiple linear regression analysis. The results of the research are that the ownership structure and characteristics of the audit committee have no effect on the level of compliance with website-based corporate information disclosure (TKPIK). Meanwhile, company age and company size have a positive and significant effect on the Level of Compliance with Corporate Information Disclosures (TKPIK) Based on Website.

Keywords: ownership structure, company age, audit committee characteristics, company size.

ABSTRAK

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, USIA PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KORPORASI (TKPIK) BERBASIS WEBSITE

Oleh

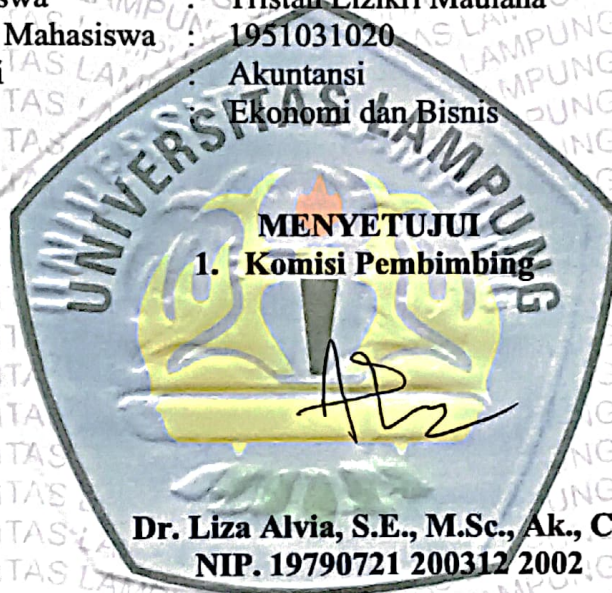
TRISTAN LIZIKRI MAULANA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis Website. Data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 serta situs web Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 164 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya adalah struktur kepemilikan dan karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis Website. Sedangkan usia perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis Website.

Kata Kunci: struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, ukuran perusahaan, TKPIK.

Judul Skripsi : PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, USIA PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KORPORASI (TKPIK) BERBASIS WEBSITE

Nama Mahasiswa : Tristan Lizikri Maulana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1951031020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



2. Ketua Jurusan

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt

Penguji Kedua : Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2024

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tristan Lizikri Maulana
NPM : 1951031020
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Usia Perusahaan, Karakteristik Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (Tkpik) Berbasis *Website*”

Telah ditulis dengan sungguh sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 19 Maret 2024
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a pink revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEKUTERA BILUJIAN 1000', 'METERAI TEMPAH', and '4C38FAL Y26708452'.

Tristan Lizikri Maulana
NPM. 1951031020

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Serang pada 12 Oktober 2000 sebagai putra ke-dua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Hata Rullah Alam dan Ibu Tini Martini.

Penulis menyelesaikan pendidikan anak-anak di TK Wijaya Kusuma pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di SD Negeri 3 Kota Serang dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Kota Serang yang diselesaikan pada tahun 2016.

Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Atas di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School hingga lulus pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar sebagai Anggota Bidang 3 HIMAKTA FEB Unila Periode 2020/2021, Anggota Bidang Redaksi PILAR FEB Unila Periode 2021/2022, Anggota Bidang 3 EEC FEB Unila Periode 2021/2022, Anggota Divisi Pemberdaya Sumber Daya Manusia PSM Unila Periode 2021/2022, Kepala Biro Usaha Mandiri ROIS FEB Unila Periode 2021/2022.

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat selama ini.
Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Hata Rullah Alam dan Ibunda Tini Martini

Terima kasih atas semua cinta yang tumpah dari ucapan, tindakan, dan doa yang diberikan kepadaku. Terima kasih telah menjadi satu-satunya alasan untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Saudara Sekandung

Pratita Tiara Putri Nurul Ilma

Terima kasih atas semua bentuk dukungan darimu yang selalu memastikan aku baik-baik saja, dan berkorban untuk ridho keluarga.

Sahabat yang terus kebersamai dengan penuh dukungan pada setiap tujuan masing-masing atau bersama. Longlife Brader.

Serta

**Almamaterku Tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG**

MOTO

Ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah SWT bergantung dari kemurkaan orang tua”

HR. Tirmidzi

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Usia Perusahaan, Karakteristik Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (Tkpik) Berbasis Website" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan hidayah, pertolongan dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tuaku tersayang: Ayahanda Hata Rullah Alam dan Ibunda Tini Martini, serta kakakku tersayang Pratita Tiara Putri Nurul Ilma atas semua bentuk dukungan yang diberikan
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc. Akt sebagai Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga pembimbing skripsi

6. Ibu Prof. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, nasihat dan saran-sarannya dalam penyempurnaan penelitian ini.
7. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak sebagai penguji kedua yang telah memberikan masukan, arahan, nasihat dan saran-sarannya dalam penyempurnaan penelitian ini
8. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika atas semua bentuk bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
10. Beberapa manusia yang masih menemani menikmati hari sampai saat ini, diantaranya Rivan, Yudo, Adika, Daffa, Galang, Inggit, Luki, Gilang, Oki, Arya, Ste, Ev, Nisa, Nyomen, Ucup, dan lainnya terima kasih telah berbagi rasa.
11. Aihara Rizy, semoga bahagia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini hanya bagian kecil dari jawaban dari permasalahan yang diangkat, dan hasil menyatakan terdapat lebih dari 50% terdapat faktor diluar yang diteliti. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Bandarlampung, 19 Maret 2024

Penulis

Tristan Lizikri Maulana

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Legitimasi	13
2.1.2 Struktur Kepemilikan	15
2.1.3 Usia Perusahaan	16
2.1.4 Karakteristik Komite Audit	17
2.1.5 Ukuran Perusahaan	19
2.1.6 POJK No. 8 Tahun 2015	20
2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis	23
2.2.1 Penelitian Terdahulu	24
2.2.2 Pengembangan Hipotesis	26
2.3 Model Penelitian	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	30
3.2.1 Jenis Data	30
3.2.2 Sumber Data	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi	31
3.4 Model Penelitian	31
3.5 Operasional Variabel	32
3.5.1 Variabel Dipenden	32

3.5.2 Variabel Independen	33
3.6 Metode Analisis Data	38
3.6.1 Analisis Deskriptif	38
3.6.2 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.3 Uji Hipotesis.....	39
3.6.4 Model Regresi.....	40
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Populasi dan Pemilihan Sampel	41
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2.1 Struktur Kepemilikan (PUB)	43
4.2.2 Usia Perusahaan (AGE).....	43
4.2.3 Karakteristik Komite Audit (ACE).....	44
4.2.4 Ukuran Perusahaan (SIZ)	44
4.2.5 Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK)	45
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	46
4.3.1 Uji Normalitas	46
4.3.2 Uji Multikolinieritas	47
4.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	48
4.4 Hasil Uji Hipotesis	48
4.4.1 Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>).....	48
4.4.2 Uji F	49
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.5.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap TKPIK	52
4.5.2 Pengaruh Usia Perusahaan terhadap TKPIK	54
4.5.3 Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap TKPIK.....	55
4.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap TKPIK.....	56
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Keterbatasan Penelitian	57
5.3 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pertumbuhan pengguna <i>internet</i> di Indonesia.....	2
Tabel 2.1 Unsur Pengukuran Indeks Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis <i>Website</i> pada Penelitian (Alvia dkk., 2022).....	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Data Populasi dan Persebaran Sampel	31
Tabel 3.2 Variabel Struktur Kepemilikan Perusahaan.....	34
Tabel 3.3 Variabel Usia Perusahaan	34
Tabel 3.4 Variabel Ukuran Perusahaan	37
Tabel 4.1 Hasil Observasi data penelitian	41
Tabel 4.2 Hasil analisis statistic deskriptif.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan <i>Kolmogrov-Smirnov Test</i>	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas Berdasarkan Uji Glejser	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>).....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji F Model Regresi	49
Tabel 4.8 Uji T	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram pertumbuhan pengguna <i>internet</i> di Indonesia	2
Gambar 2.1 Model Penelitian	29
Gambar 4.1 Hasil pengujian normalitas.....	46

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) POJK No. 8 Tahun 2015.

Penelitian ini dimotivasi oleh perkembangan peradaban manusia era *Society 5.0*. *Society 5.0* merupakan sebuah paradigma peradaban sosial-ekonomi terkini yang mendeskripsikan konsensus prioritas sosial dan lingkungan ekonomi yang terintegrasi (Ievgeniia dkk., 2022). Hal ini membuat setiap perusahaan akan berjuang dalam keberlangsungan bisnisnya yang berkelanjutan dalam jangka panjang harus memerhatikan pengembangan analitik modern, teknologi big data, kecerdasan buatan, penerapan robotika dan penggunaan *Internet of Things* (Shkarlet dkk., 2020).

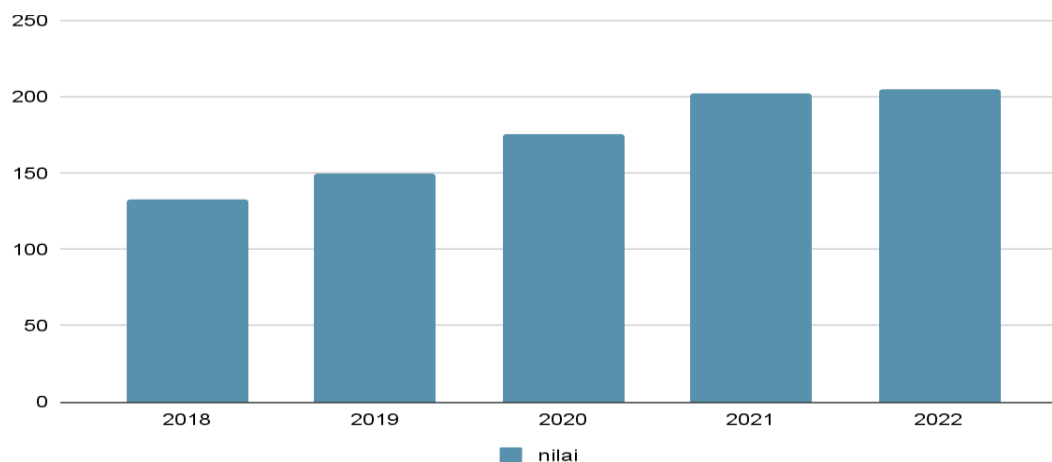
Fasilitas digital dan *internet* menjadi kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bertukar informasi terkini, kompleks dengan biaya yang rendah. Informasi digital ibarat sebuah perpustakaan dunia yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun (Nair, 2002).

Seberapa penting peran dunia digital? Kemp (2022) menyatakan bahwa perkembangan pengguna *internet* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terhitung per Januari 2022 pengguna *internet* di *Internet* mencapai 204,7 juta pengguna *internet* di Tanah Air dari 277,7 juta total penduduk.

Tabel 1. 1 Data pertumbuhan pengguna *internet* di Indonesia

No	Tahun (per 1 Januari)	Nilai / juta pengguna	Persentase kenaikan
1	2018	132,7	-
2	2019	150	13,04 %
3	2020	175,4	16,93 %
4	2021	202,6	15,51 %
5	2022	204,7	1,04 %

Sumber: Laporan *We Are Social* dalam Kemp (2022). Diolah oleh: Peneliti

Gambar 1. 1 Diagram pertumbuhan pengguna *internet* di Indonesia

Sumber: Laporan *We Are Sosial* dalam Kemp (2022). Diolah oleh: Peneliti

Tabel data pengguna *internet* di Indonesia yang diperjelas gambar diagram ini menunjukkan pergerakan peningkatan jumlah pengguna *internet* di Indonesia sejak 2018 sampai dengan awal 2022. Data tersebut menjelaskan bahwa masyarakat pengguna *internet* di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan dari tahun 2018 ke awal tahun 2022 mengalami lonjakan peningkatan sebesar 54,25%. Sementara itu, pada sisi lain peningkatan tersebut didukung dengan tingkat penetrasi *internet* di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Sedangkan, tingkat penetrasi *internet* di Indonesia pada tahun 2018 baru mencapai 50% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menjadi fakta fenomena bahwa

peningkatan tingkat penetrasi *internet* di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam kurun waktu lima tahun dari 2018 sampai dengan awal tahun 2022. Namun, patut diperhatikan, bahwa *We Are Social* dalam penelitiannya ini meyakini adanya fenomena pandemi *Covid-19* telah memengaruhi penelitian terkait adopsi *internet* ini, sehingga mereka meyakini angka pengguna *internet* yang sebenarnya mungkin lebih tinggi dari hasil yang telah dipublikasikan.

Pada kegiatan investasi dalam merespon *Society 5.0*, penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2015) terkait faktor determinan yang mempengaruhi minat penggunaan *website* pada proses pengambilan keputusan investasi, berkesimpulan bahwa adanya motivasi terhadap minat publik menggunakan *website* dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian tersebut menggunakan determinan persepsi nilai informasi, kegunaan, dan kemudahan untuk pengambilan keputusan investasi menggunakan *website*.

Fenomena yang dijelaskan di atas, terkait perkembangan peradaban *Society 5.0*, peningkatan pengguna *internet*, dan penggunaan *website* dalam proses pengambilan keputusan investasi menjadikan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* perlu dipertimbangkan. Fenomena ini direspon oleh perusahaan dalam upaya optimalisasi *website* untuk meraih legitimasi dari publik melalui pengungkapan informasi perusahaan mereka melalui *website* perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkannya regulasi untuk pelaporan informasi korporasi berbasis *website* untuk keseragaman terkait pengungkapan informasi korporasi oleh setiap perusahaan terbuka. Otoritas Jasa Keuangan melihat fenomena tersebut juga telah menerbitkan Peraturan OJK POJK No. 8 Tahun 2015 tentang kewajiban emiten mengungkapkan informasi melalui *website* emiten. Pada peraturan tersebut tertera informasi-informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan melalui *website* resmi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langkah pembuatan regulasi ini dipandang sebagai langkah pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk mengetahui perusahaan yang beraktivitas di wilayahnya tidak membahayakan masyarakat. *Website* menjadi alat perusahaan untuk memberikan informasi aktivitas kepada regulator, pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga dapat memantau dan melihat

kewajaran aktivitas perusahaan. Namun, peraturan ini belum memuat mekanisme, dan template pelaporan informasi yang menyebabkan ragam jenis template pada setiap perusahaan berbeda-beda termasuk pengelompokan klasifikasi informasi tersebut.

Sebelum diterbitkannya POJK No. 8 Tahun 2015, sejumlah penelitian telah melakukan penelitian pelaporan informasi keuangan berbasis *website* dengan menggunakan istilah IFR, yaitu *Internet Financial Reporting* melalui pendekatan indikator-indikator tersendiri berdasarkan peneliti, diantaranya hasil penelitian Lestari & Chariri (2007) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting*, namun profitabilitas tidak mempengaruhi *Internet Financial Reporting*. Selanjutnya, Agustina (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris profitabilitas, *leverage* jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *Internet Financial Reporting*. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozak (2012), bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik *Internet Financial Reporting*, faktor lain seperti *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *Internet Financial Reporting*. Siagian & Ghodzali (2012), profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Penelitian dari Puri (2013) memperoleh hasil bahwa *leverage*, profitabilitas, dan kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Amalia & Laksito (2013) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Penelitian Muliati (2013) berkesimpulan bahwa jumlah perusahaan yang melaporkan informasi keuangan di *website* masih kurang dari 50% pada tahun 2012 dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Khikmawati & Agustina (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2015), bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Bukti empiris ini membuktikan bahwa tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan berbasis *website* sebelum diterbitkannya POJK No. 8 tahun 2015.

Penelitian kali ini berbeda dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan, sebab penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan indikator-indikator yang wajib diungkapkan sesuai dengan regulasi POJK No. 8 Tahun 2015 dan penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian Alvia dkk. (2022) yang menghasilkan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) berbasis *website* berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015 rendah, yaitu sebesar 38%. Penelitian oleh Alvia dkk. (2022) mengungkapkan banyaknya perusahaan terbuka yang didapati tidak melakukan keterbukaan informasi secara lengkap dan transparan pada *website*, sulitnya akses ke *website* dan mengunduh berkas di dalam *website*, bahkan terdapat entitas yang tidak bisa ditemukan *website* resminya. Hal ini patut diteliti lebih dalam lagi terkait faktor determinan ketidakpatuhan perusahaan terhadap POJK No. 8 Tahun 2015.

Menurut Sembiring (2012), suatu laporan tahunan (laporan korporasi) dibidang memuat informasi yang baik jika berisi informasi yang relevan dan pengungkapan yang dilakukan dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Beliau menjelaskan, bahwa luas pengungkapan dan mutu suatu laporan korporasi berbeda-beda bagi setiap korporasi yang disebabkan adanya perbedaan antara karakteristik dan filosofi masing-masing manajemen perusahaan. Oleh sebab ini, penelitian kali ini berupaya untuk menganalisis faktor determinan dari rendahnya TKPIK yang dihasilkan dari penelitian Alvia dkk. (2022) dari sudut pandang karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Sektor ini menjadi sektor yang kuat sebab mencakup kebutuhan umum masyarakat sehari-hari. Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia bahwa pada tahun 2018 perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sektor perdagangan, jasa, dan investasi mendominasi dengan 36,4% dari kebutuhan masyarakat (Burhanudin & Cipta, 2021). Pada persaingan bisnis, perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi bersaing dengan ketat dilihat dengan banyaknya perkembangan bisnis yang memiliki usaha yang sama dalam bidang perdagangan, jasa, dan investasi. Persaingan tersebut

membuat antarperusahaan secara alami ditekan untuk meningkatkan kinerjanya, memiliki keunggulan dibanding para pesaing, dan melakukan aktivitas untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat, salah satunya melakukan pengungkapan informasi keuangan berbasis *website*.

Sejalan dengan teori legitimasi bahwasannya perusahaan yang baik akan mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan legitimasi yang baik dari pandangan pemangku kepentingan khususnya pemegang saham. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian oleh Nurfadilah (2017), menyatakan struktur kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Agboola & Salawu (2012), menyatakan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan berbasis *website*, perusahaan dengan kepemilikan privat lebih dominan melakukan praktik pelaporan keuangan berbasis *website* dari pada perusahaan dengan struktur selain kepemilikan privat. Aminah dkk. (2021), menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Satwika & Sari (2021), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan informasi *Internet Financial Reporting*.

Menurut Umoren & Asogwa (2013), Asosiasi positif didasarkan pada premis bahwa semakin berusia perusahaan, diasumsikan semakin berpengalaman dan mapan cenderung melakukan pengungkapan lebih banyak informasi. Hal itu disebabkan perusahaan yang lebih berpengalaman memiliki sistem pelaporan yang andal dan ekonomis. Sebaliknya, asosiasi negatif menyatakan bahwa semakin muda perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi lebih banyak guna peningkatan kepercayaan investor dan mengurangi skeptisme. Apa hubungan usia perusahaan dengan pengungkapan informasi keuangan? Terdapat keragaman hasil pada penelitian. Asosiasi positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dikemukakan oleh Owusu-Ansah (1998), Haniffa & Cooke (2002), Prencipe (2004), Akhtaruddin (2005), Al-Shammari (2005), Abdullah dkk. (2017), dan Meinawati dkk. (2020). Sedangkan asosiasi negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan dikemukakan oleh Glaum

& Street (2003); serta Satwika & Sari (2021) yang menyatakan hubungan negatif antara usia perusahaan (usia *listing*) terhadap kelengkapan informasi pelaporan keuangan berbasis *internet*.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian terkait pengaruh usia perusahaan terhadap pengungkapan informasi keuangan berbasis *internet* yang telah dipaparkan. Penelitian kali ini akan menggunakan usia perusahaan berdasarkan didirikannya perusahaan tersebut dan variabel dependen menggunakan TKPIK hasil penelitian Alvia dkk. (2022) yang menggunakan indikator sesuai regulasi yang berlaku saat ini, yaitu POJK No. 8 Tahun 2015. Penelitian ini akan menjawab apakah perusahaan akan bersifat asosiasi positif atau asosiasi negatif dalam upaya mendapatkan legitimasi pemangku kepentingan melalui melalui pengungkapan informasi keuangan yang diwajibkan berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015.

Selanjutnya, karakteristik komite audit sebagai bagian internal perusahaan yang juga termasuk ke dalam karakteristik perusahaan dimana memiliki tugas dalam membantu pengawasan secara langsung terhadap kelangsungan aktivitas perusahaan, salah satunya pengawasan terhadap aktivitas pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Abdillah (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting disclosure*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat andil dalam minimnya pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan dan tentu ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak-pihak berkuasa untuk melakukan pembatasan informasi. Peneliti meyakini, komite audit yang kompeten akan bertanggung jawab memenuhi kewajiban POJK No. 8 Tahun 2015, selain sebab tuntutan regulator, penyajian informasi yang lengkap, mudah dimengerti, dan terkini akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk penilaian kinerja. Peneliti meyakini, dari pengungkapan yang lengkap, terkini, dan mudah dipahami akan mempengaruhi minat shareholders dalam melakukan aktivitas investasi. Oleh sebab itu, peneliti akan menganalisis terkait karakteristik komite audit berdasarkan rasio anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial dari keseluruhan anggota komite audit.

Ukuran perusahaan merupakan skala ukuran yang mengklasifikasikan tingkatan setiap perusahaan apakah tergolong dalam jenis perusahaan kecil, perusahaan sedang, atau perusahaan besar. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator. Suwito & Herawaty (2005) menjelaskan bahwa dalam penilaian ukuran perusahaan biasanya didasarkan pada indikator total aset yang dimiliki perusahaan. Stowe dkk. (2010), menjelaskan bahwa dalam menggolongkan ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan indikator total aset, jumlah penjualan pada periode tertentu, atau dari nilai pasar ekuitas yang dimiliki perusahaan.

Ukuran perusahaan menjadi variabel yang harus dipertimbangkan dalam investigasi faktor determinan dari rendahnya TKPIK sebab ukuran perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan seberapa cepat pihak manajemen melakukan pengungkapan informasi untuk pemangku kepentingan (Suryanto, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak top manajemen pada perusahaan besar akan tunduk pada pengawasan publik. Pada aktivitas pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan besar dinilai memerlukan dana yang lebih besar sebab perusahaan besar lebih dikenal publik sehingga akan menjadi sorotan publik apabila perusahaan besar melakukan manajemen informasi, yaitu pengungkapan informasi yang dinilai tidak lengkap, transparan, dan atau terkini. Oleh sebab itu, perusahaan besar akan cenderung memiliki rasa tanggung jawab lebih besar dalam pengungkapan informasi tersebut, salah satunya pengungkapan informasi keuangan berbasis *website*. Dana dalam aktivitas pengungkapan informasi disebut biaya agensi, yaitu dana yang dialokasikan untuk biaya dalam melakukan penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan (Oyelere dkk., 2003; Zare and Rajaeepur, 2019).

Penjelasan di atas menjadi fenomena yang melatarbelakangi penelitian kali ini dengan judul penelitian **“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Usia Perusahaan, Karakteristik Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis Website”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, peneliti telah melakukan perumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*?
- 2) Bagaimana pengaruh usia perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*?
- 3) Bagaimana pengaruh karakteristik komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*?
- 4) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*.
- 2) Menganalisis pengaruh usia perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*.
- 3) Menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*.
- 4) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diterangkan, adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan bukti empiris validitas teori legitimasi yang menjadi landasan dalam penelitian tentang pengaruh

karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi berbasis *website* yang didasarkan pada POJK No.8 Tahun 2015 dengan objek penelitian pada perusahaan terbuka sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengetahuan mengenai determinan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi berbasis *website* berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015.

1.4.2 Manfaat Empiris

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjawab faktor-faktor yang melatarbelakangi Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi berbasis *website* dengan menggunakan teori legitimasi sebagai landasan dasar untuk variabel karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan dengan objek penelitian pada perusahaan terbuka sektor perdagangan, jasa, investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021.

Penelitian ini menjawab dengan menggunakan teori legitimasi yang akan menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhi pengungkapan informasi korporasi, dan manajemen informasi dalam penyebarluasan informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Teori legitimasi digunakan untuk menjawab pengaruh yang diberikan oleh faktor usia perusahaan dengan didasarkan juga pada penelitian, yaitu Asosiasi positif didasarkan pada premis bahwa perusahaan yang lebih berpengalaman cenderung lebih lengkap dalam pengungkapan informasi. Umoren & Asogwa (2013) Teori legitimasi digunakan dalam menjawab pengaruh yang diberikan oleh faktor karakteristik komite audit akan mempengaruhi pengungkapan informasi yang didasarkan adanya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Teori legitimasi digunakan dalam menjawab pengaruh yang diberikan oleh ukuran perusahaan yang didasarkan bahwa perusahaan besar

menjadi pusat perhatian *stakeholders*, sehingga perusahaan besar akan berusaha mencari legitimasi masyarakat untuk menjaga citra positif perusahaannya dengan mematuhi kewajiban pengungkapan informasi korporasi.

1.4.3 Manfaat Praktis

1.4.3.1 Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber literasi dan referensi yang memberikan informasi tentang faktor determinan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi melalui pendekatan karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan berlandaskan teori legitimasi.

1.4.3.2 Bagi perusahaan

Penelitian ini menjadi bukti empiris bagi perusahaan dalam menilai seberapa penting pengungkapan informasi berbasis *website*. Penelitian ini menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk membangun karakteristik perusahaannya lebih baik lagi untuk mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan, mendorong pemangku kepentingan mengambil keputusan ekonomi yang menguntungkan perusahaan, dan perbaikan serta pengetatan dalam memastikan perusahaan telah melakukan pengungkapan informasi keuangan berbasis *website* paling kurang yang diwajibkan oleh regulator yang tercantum pada regulasi POJK No.8 tahun 2015.

1.4.3.3 Bagi pemerintah

Penelitian ini menjadi bukti empiris peranan POJK Nomor 8 Tahun 2015. Bagaimana faktor karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi berbasis *website* sesuai POJK No. 8 tahun 2015. Sebelum peraturan ini diterbitkan, penelitian Muliati (2013) berkesimpulan bahwa perusahaan yang melaporkan informasi keuangan di *website* kurang dari 50% pada tahun 2012, namun penelitian Alvia dkk. (2022) juga menghasilkan indeks kepatuhan

pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* sebesar 38%. Hal ini menunjukkan sejak diterbitkannya POJK No. 8 tahun 2015 perusahaan belum mematuhi peraturan tersebut. OJK RI selaku regulator diharapkan melakukan tindakan penegasan dan memberikan sanksi yang telah ditetapkan kepada perusahaan yang terbukti tidak melakukan kewajibannya dalam pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Selain itu, belum ada regulasi tambahan terkait penyusunan dan penempatan poin-poin pengungkapan informasi tersebut yang menyebabkan banyaknya ragam *template website* dalam penempatan informasi berbasis *website* pada perusahaan.

1.4.3.4 Bagi pemegang saham

Penelitian ini menjadi bukti empiris terhadap pengaruh yang diberikan oleh karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* sesuai POJK No. 8 Tahun 2015.

Penelitian ini menunjukkan bahwa investor publik tidak memiliki kekuatan untuk menuntut perusahaannya dalam pemenuhan kewajiban pada POJK No. 8 tahun 2015. Hal ini dapat dijadikan acuan oleh investor dan calon investor dalam mengambil keputusan ekonomi dengan memperhatikan perkembangan karakteristik perusahaan dan tingkat kepatuhan pengungkapan informasi korporasi terkait.

1.4.3.5 Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikritisi oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi tambahan, pengembangan penelitian secara mendalam maupun meluas mencakup perusahaan dalam sektor lainnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi diawali dengan konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) dalam Gumanti (2009) bahwa legitimasi merupakan kondisi ketika sistem nilai entitas sejalan dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada. Hal ini mengakibatkan terjadi suatu perbedaan, baik yang nyata atau berpotensi muncul di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi entitas. Degan (2004) dalam Gumanti (2009) mengungkapkan, bahwa teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut juga yang mendasari bahwa suatu organisasi akan melakukan pengungkapan secara sukarela aktivitasnya sebab manajemen berpandangan bahwa hal tersebut yang diharapkan masyarakat.

Gumanti (2009) teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena penyesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate*. Hal tersebut menjadi landasan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi baik atas kewajiban ataupun sukarela guna menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat - dalam penelitian ini, yaitu pemegang saham.

Menurut Amri (2021), legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Hal tersebut menyebabkan aktivitas perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat kepada perusahaan. Pada realisasinya, perusahaan akan melakukan identifikasi atas harapan-harapan yang diinginkan pemangku kepentingan, terutama pihak pemangku kepentingan yang paling berpengaruh. Mengapa? tentu karena apabila harapan-harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi, maka perusahaan akan mengupayakan setidaknya berdasarkan harapan pemangku kepentingan yang paling berpengaruh tersebut. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan antara aktivitas perusahaan dengan harapan pemangku kepentingan, maka akan terjadi *legitimacy gap*. Pada akhirnya, perusahaan berfokus pada tujuan akhir dari pemerolehan legitimasi yaitu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan profit maksimum dan peningkatan reputasi perusahaan yang berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut.

Komunikasi menjadi poin krusial untuk memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan yang diharapkan perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Lindblom (1994) yang disebutkan dalam Amri (2021), bahwa sebuah organisasi dapat menggunakan empat strategi legitimasi ketika adanya ancaman legitimasi, antara lain:

- 1) Meyakinkan pemangku kepentingan melalui edukasi dan memberikan informasi terkait penyesuaian tindakan organisasi atau dengan menjustifikasi para pemangku kepentingan tentang tujuan organisasi dalam peningkatan kinerjanya melalui perubahan organisasi.
- 2) Mengubah persepsi organisasi, tanpa mengubah kinerja aktual organisasi
- 3) Pengalihan isu penting yang buruk bagi pemangku kepentingan ke isu-isu lain yang berhubungan dengan pendekatan *emotif symbols* untuk memanipulasi persepsi pemangku kepentingan
- 4) Mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi

Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi perusahaan kepada publik, salah satunya dengan pengungkapan informasi berbasis *website*. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang dapat memperkuat legitimasinya, seperti mempublikasikan penghargaan, pencapaian kinerja, program program unggulan dan proyeksi di masa depan. Pada penggunaan *website* perihal pengungkapan, informasi perusahaan juga dapat mengklarifikasi atau bahkan membantah berita-berita negatif yang mungkin muncul di media.

2.1.2 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik teori keagenan mengenai hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Variasi pengaturan kepemilikan juga mempengaruhi tingkat dan konsistensi dari praktik pengungkapan perusahaan (Van Der Laan Smith dkk., 2005). Konsentrasi kepemilikan dengan kepemilikan tersebar lebih diyakini dapat meningkatkan kebijakan pelaporan keuangan (Reverte, 2009). Selain struktur kepemilikan mencerminkan komposisi kepemilikan saham, konsentrasi struktur kepemilikan juga mencerminkan komitmen pemilik untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan (Nurfadilah, 2017).

Struktur kepemilikan merupakan hal yang penting dalam menentukan nilai perusahaan. Pandangan terhadap struktur kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan kepemilikan oleh pihak dalam. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan (Nurfadillah, 2017).

Menurut Baraqat dkk. (2020), pengaturan kepemilikan memiliki dampak eksplisit pada tingkat pengungkapan korporasi berbasis daring. Apabila konsentrasi kepemilikan tersebut dan memiliki banyak pemangku kepentingan, maka tingkat keterbukaan informasi akan lebih besar. Beberapa penelitian seperti Hasan dkk. (2010), dan Said dkk. (2009) membuktikan adanya hubungan

positif dimana kepemilikan yang terkonsentrasi dapat mempengaruhi pengungkapan korporasi. Studi lain oleh penelitian lain juga ada seperti Gandía (2008), dan Khlif dkk. (2017) membuktikan hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dan tingkat pengungkapan korporasi.

2.1.3 Usia Perusahaan

Menurut Poerwadarminta (2003) dalam Meinawati dkk. (2020), defisini usia perusahaan adalah lamanya waktu hidup atau ada sejak dibentuk atau dilahirkan. Secara umum, usia perusahaan merupakan lamanya waktu perusahaan melakukan aktivitas dalam kelangsungan usahanya dari sejak didirikan perusahaan tersebut hingga waktu terkini perusahaan melakukan aktivitas usaha guna kelangsungan usahanya dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Perusahaan dengan usia hidup yang lebih lama memiliki profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan baru.

Usia perusahaan yang dihitung dalam penelitian ini dimulai pada awal tercatatnya perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Menurut Umoren & Asogwa (2013), asosiasi positif didasarkan pada premis bahwa perusahaan berusia tua dan berpengalaman cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi sebab mereka telah menetapkannya dalam aturan perusahaan, dan sistem pelaporan dengan biaya yang efektif. Sebaliknya, asosiasi negatif berpremis bahwa perusahaan yang lebih muda mengungkapkan lebih banyak informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalisir adanya skeptis pada pemangku kepentingan.

Menurut Umoren dan Asogwa (2013) usia perusahaan dapat dihitung dengan cara:

- 1) Usia perusahaan = tahun penelitian - *first issue*
- 2) Usia perusahaan = tahun penelitian - tahun berdiri

Peneliti menggunakan perhitungan menurut Umoren & Asogwa (2013) poin 2. Peneliti memilih perhitungan menggunakan poin 2 sebab lebih

mengorientasikan usia sebenarnya dan menunjukkan seberapa lama pengalamannya dalam menjalankan sebuah perusahaan.

2.1.4 Karakteristik Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance Republik Indonesia (KNKG RI) (2006), komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite audit.

Bursa Efek Indonesia saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta (2000) melalui Kep. Direksi BEI No. Kep-315/BEJ/06/2000 mendefinisikan, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Pada keputusan Kementerian BUMN RI (2002) Nomor: Kep-103/MBU/2002 menjelaskan yang pada intinya komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya beranggotakan satu orang komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN (secara umum dapat diartikan pegawai perusahaan itu sendiri atau anak perusahaan) yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

Pernyataan terkait definisi komite audit juga dijelaskan dalam Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM RI (2004) Nomor: Kep-29/PM/2004 yang mendefinisikan komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang beranggotakan sekurang-kurangnya satu anggota dewan komisaris yang memiliki fungsi berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan perusahaan guna menjaga efektivitas, efisiensi, ekonomis dalam kelangsungan perusahaan.

2.1.4.1 Tujuan Pembentukan Komite Audit

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) (2016) POJK Nomor: 04 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan komite audit untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit bersifat independen dalam melaksanakan fungsinya. Komposisi komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota berasal dari komisaris independen dan/atau pihak dari luar entitas yang diketuai oleh komisaris independen yang berarti adanya rangkap jabatan pada dirinya, yaitu sebagai ketua komite audit dan komisaris independen.

Seiring penjelasan tersebut, dapat diketahui pembentukan komite audit disebabkan peranan dewan komisaris dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis kelangsungan perusahaan belum memadai. Tujuan pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Pengungkapan informasi keuangan tentu akan andal apabila kompetensi komite audit entitas tersebut dilatarbelakangi oleh kompetensi di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis.

Ukuran komite audit yang memadai menjadi hal yang penting untuk mitigasi masalah keuangan ataupun aktivitas perusahaan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor khususnya mengenai pengungkapan korporasi berbasis

website yang disajikan perusahaan sekurang-kurangnya sesuai POJK No. 8 tahun 2015.

Intensitas aktivitas komite audit akan mencerminkan karakteristik komite audit perusahaan tersebut. Pertemuan atau rapat komite audit menjadi aktivitas yang memiliki manfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan - termasuk pengawasan terhadap pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Frekuensi rapat komite audit dipengaruhi beberapa hal, diantaranya tugas, tanggung jawab, dan ukuran perusahaan (Zulfikar dkk., 2019).

Peraturan Bank Indonesia (2006) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menyatakan, bahwa Komite Audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hal tersebut didasari atas fungsi komite audit dan tugas komite audit yang berhubungan erat dengan keahlian keuangan guna fungsi komite audit dapat berfungsi secara efektif dan diharapkan kinerja komite audit lebih baik - termasuk memastikan perusahaan melakukan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Zulfikar dkk. (2019) membuktikan bahwa ukuran komite audit, frekuensi komite audit, dan keahlian komite audit di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi berbasis *website*.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Secara sederhana, ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai penentuan apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan kecil, atau besar. Suryanto (2019) ukuran perusahaan digolongkan menjadi tiga golongan, meliputi perusahaan kecil, sedang, dan besar.

Adapun variabel yang digunakan dalam menentukan ukuran perusahaan beragam. Basyaib (2007) dalam Suryanto (2019) penentuan ukuran perusahaan menggunakan ukuran pendapatan, total aktiva, dan total modal. Stowe dkk. (2010) ukuran perusahaan diukur dari total aset, penjualan, atau dari nilai pasar

ekuitas perusahaan. Menurut Nurfadilah (2017), pengertian ukuran perusahaan adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas dari suatu perusahaan dalam menilai apakah sebuah perusahaan digolongkan sebagai sebuah perusahaan kecil, atau besar melalui instrumen penghitungan dilihat dari nilai total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Penelitian kali ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang terdiri dari penilaian terhadap total aktiva.

2.1.6 POJK No. 8 Tahun 2015

Presiden RI (1995) melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tentang keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan bagi emiten dan perusahaan publik. POJK No. 8 Tahun 2015 merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* yang didasari oleh upaya pemerintah dalam menuntut transparansi serta memberikan akses pemangku kepentingan terkait informasi emiten yang aktual sebagai implementasi atas prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) oleh emiten. Prinsip transparansi diwujudkan melalui tranparansi informasi oleh emiten dengan menggunakan *website* sebagai media publikasi.

POJK No. 8 Tahun 2015 tentang kewajiban emiten mengungkapkan informasi melalui situs web emiten di laman *web* perusahaan. Pengungkapan informasi harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami - salah satunya diharuskan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa inggris dimana apabila ada perbedaan penafsiran informasi, informasi yang menjadi acuan adalah informasi dalam bahasa indonesia. Situs *web* dan informasi yang dimuat dalam situs *web* harus dapat diakses setiap saat oleh publik.

Pada peraturan tersebut tertera informasi-informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan melalui *website* resmi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Informasi-informasi yang dimuat dalam situs web paling kurang dipaparkan pada POJK No. 8 tahun 2015 pasal 6, meliputi:

- 1) Informasi umum emiten atau perusahaan publik

- 2) Informasi bagi pemodal atau investor
- 3) informasi tata kelola perusahaan, dan
- 4) informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebelum diterbitkannya POJK No. 8 tahun 2015, penelitian Muliati (2013) berkesimpulan bahwa perusahaan yang melaporkan informasi keuangan di *website* kurang dari 50% pada tahun 2012 dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Khikmawati & Agustina, 2015). Fenomena ini membuktikan bahwa tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan berbasis *website* sebelum diterbitkannya POJK No. 8 tahun 2015.

Penelitian dari Lestari & Chariri (2007) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap praktik IFR sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi IFR. Rozak (2012) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik IFR, faktor lain seperti *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik IFR. Abdillah (2015) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan IFR. Siagian & Ghozhali (2012) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap IFR.

Agustina (2009) memperoleh hasil bahwa profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap IFR. Puri (2013) memperoleh hasil bahwa *leverage*, profitabilitas, dan kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap IFR. Amalia & Laksito (2013) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap IFR. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris profitabilitas, *leverage* jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi IFR

Pasca penerbitan POJK No. 8 tahun 2015, Alvia dkk. (2022) mengungkapkan penilaian kepatuhan perusahaan terhadap POJK No. 8 tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan indikator yang dimuat oleh POJK No. 8 tahun 2015 sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Unsur Pengukuran Indeks Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* pada Penelitian (Alvia dkk., 2022).

Unsur pengungkapan	
Informasi Umum Emiten	Informasi Tata Kelola
1 Nama dan kontak emiten	16 pedoman kerja direksi dan komisaris
2 Riwayat singkat emiten, struktur organisasi emiten	17 pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan sekretaris perusahaan
3 struktur kepemilikan emiten	18 piagam unit audit internal
4 struktur grup emiten	19 kode etik
5 profil direksi, komisaris, dan komite	20 pedoman kerja komite
6 Dokumen anggaran dasar	21 pengangkatan dan pemberhentian komite audit
Informasi untuk investor	22 prosedur nominasi dan remunerasi
7 Prospektus	23 kebijakan manajemen risiko
8 Laporan tahunan	24 kebijakan mekanisme pelaporan pelanggaran
9 informasi keuangan	25 kebijakan anti korupsi
10 informasi RUPS	26 kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur
11 informasi saham	27 kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor
12 informasi obligasi	Informasi Tanggung Jawab Sosial
13 informasi dividen	28 kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek lingkungan hidup
14 informasi aksi korporasi	29 kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek ketenagakerjaan
15 informasi fakta material lainnya	30 kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan
	31 kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek tanggung jawab produk dan jasa

sumber: unsur pengukuran indeks kepatuhan pengungkapan informasi berbasis *website* pada penelitian Alvia dkk. (2022)
diolah oleh: peneliti

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berdasarkan hasil penelitian Alvia dkk. (2022) yaitu TKPIK (Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi). Penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor determinan dari sisi karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap TKPIK (Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi) berbasis *website*.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian kali ini dalam menganalisis faktor determinan dari rendahnya Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi berdasarkan indeks dari penelitian Alvia dkk. (2022) melakukan pengembangan hipotesis berdasarkan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengungkapan informasi berbasis *internet*. Penelitian terdahulu didominasi oleh faktor determinan yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting*, meliputi Nurfadilah (2017), Abdullah dkk. (2017), Aminah dkk. (2021), Meinawati dkk. (2020), Baraqat dkk. (2020), dan Satwika & Sari (2021). Pola penelitian berbeda namun tetap menggunakan *Internet Financial Reporting* dilakukan oleh Suryanto (2019) dimana indeks *Internet Financial Reporting* menjadi variabel independen terhadap *Trading Volume Activity*. Penelitian-penelitian yang telah disebutkan tidak menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan regulasi yang berlaku. Alvia dkk. (2022) dalam penelitiannya menggunakan indikator yang dimuat oleh POJK No. 8 Tahun 2015, penelitian beliau menghasilkan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi. Penelitian kali ini akan mengungkapkan faktor determinan dari rendahnya Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi sebesar 38% dari penelitian Alvia dkk. (2022) berdasarkan indikator pengungkapan yang dimuat dari POJK No. 8 Tahun 2015.

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Teori	Hasil
1	Alvia dkk. (2022)	Analisis Pengungkapan Informasi Berbasis <i>Web</i> pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia (Sebuah Studi Analisis Konten atas Implementasi POJK No. 8 Tahun 2015)	Informasi umum emiten Informasi untuk pemodal atau investor Informasi tata kelola Informasi tanggung jawab sosial		Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh
2	Nurfadilah (2017)	Pengaruh Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Rentabilitas dan Ukuran Perusahaan Pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia	Umur Perusahaan Struktur Kepemilikan Rentabilitas Ukuran perusahaan	Teori Agensi Teori Sinyal Teori Pemegang saham	Positif dan signifikan Positif dan signifikan Positif dan signifikan Positif dan signifikan
3	Abdullah dkk. (2017)	<i>The Effect of Company Size, Company Age, Public Ownership and Audit Quality on Internet Financial Reporting</i>	<i>Company size</i> <i>Company Age</i> <i>Public Ownership</i> <i>Audit Quality</i>	<i>Agency Theory</i> <i>Signalling Theory</i>	<i>Positive and significant</i> <i>Positive and significant</i> <i>Positive and significant</i> <i>Positive but insignificant</i>
4	Aminah dkk. (2021)	Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Laporan Keuangan	Umur Perusahaan Ukuran Perusahaan Kepemilikan manajerial	Teori agensi	Positif dan signifikan Positif dan signifikan Negatif dan signifikan

5	Meinawati dkk. (2020)	Analisis Determinan Pengungkapan <i>Internet Financial Reporting</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Profitabilitas Likuiditas Ukuran perusahaan Umur perusahaan Reputasi auditor	teori sinyal	tidak berpengaruh tidak berpengaruh positif dan signifikan tidak berpengaruh berpengaruh signifikan
6	Baraqat dkk. (2020)	<i>The Impact Corporate Governance on Internet Financial Reporting: Empirical Evidence from Palestine</i>	<i>Board Educational Background Board independent Board audit committee Audit firm</i> <i>Ownership concentration</i>	<i>Agency theory</i>	berpengaruh signifikan tidak berpengaruh tidak berpengaruh tidak berpengaruh positif dan signifikan
7	Satwika & Sari (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur <i>Listing</i> , Reputasi Auditor, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kelengkapan Informasi <i>Internet Financial Reporting</i>	Ukuran perusahaan Umur <i>listing</i> reputasi auditor Kepemilikan institusional	Teori keagenan	Positif dan signifikan negatif dan signifikan positif dan signifikan tidak berpengaruh
8	Suryanto (2019)	<i>Effect of Internet Financial Reporting and Company Size on Stock Trading Volume at LQ45 Company in Indonesia Stock Exchange</i>	<i>Internet Financial Reporting</i> ukuran perusahaan Simultan		Tidak berpengaruh Positif dan signifikan Positif dan signifikan

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.2.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kepatuhan Pengungkapan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

Berdasarkan konsep teori legitimasi dimana perusahaan yang baik akan mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan legitimasi yang baik dari pandangan pemangku kepentingan khususnya pemegang saham. Peneliti meyakini bahwa perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan rendah, atau memiliki banyak pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham memiliki probabilitas lebih tinggi dalam mematuhi kewajiban dalam mengungkapkan informasi korporasi berbasis *website*. Struktur kepemilikan yang tersebar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, pengawasan yang ketat akan menuntut pengungkapan yang baik. Penelitian terdahulu oleh Agboola & Salawu (2012) menyatakan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan berbasis *website*, perusahaan dengan kepemilikan privat lebih dominan melakukan praktik pelaporan keuangan berbasis *website* dari pada perusahaan dengan struktur selain kepemilikan privat. Selanjutnya, Nurfadilah (2017) juga membuktikan hubungan struktur kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan yang didasari oleh teori legitimasi.

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti telah membuat hipotesis penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

H1: Struktur Kepemilikan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

2.2.2.2 Pengaruh Usia Perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

Usia perusahaan merupakan unsur yang dapat menginterpretasikan pengalaman perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang berpengalaman akan cenderung mematuhi kewajiban dalam melakukan pengungkapan informasi berbasis *website*. Hal tersebut didasari oleh sumber daya manusia yang berpengalaman, sistem pengendalian internal yang sudah teruji dan banyak mengalami peningkatan, rutinitas pelaporan dan pengungkapan yang telah dilakukan bertahun-tahun membuat perusahaan lebih memperhatikan kelengkapan pengungkapan informasi. Menurut Umoren & Asogwa (2013), usia perusahaan berlandaskan teori legitimasi, bahwa asosiasi positif didasarkan pada premis perusahaan yang lebih tua, berpengalaman dan mapan cenderung melakukan pengungkapan informasi dengan argumen perusahaan yang berpengalaman memiliki sistem pelaporan yang andal dan ekonomis. Sebaliknya, asosiasi negatif menyatakan bahwa perusahaan yang lebih muda yang melakukan pengungkapan informasi lebih banyak guna peningkatan kepercayaan investor dan mengurangi skeptisme. Penelitian terdahulu memiliki kesimpulan perusahaan bersifat asosiasi positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dikemukakan oleh Owusu-Ansah (1998), Haniffa & Cooke (2002), Prencipe (2004), Akhtaruddin (2005), Al-Shammari (2005), Abdullah dkk. (2017), dan Meinawati dkk. (2020).

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti telah membuat hipotesis penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

H2: Usia perusahaan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

2.2.2.3 Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

Berdasarkan teori legitimasi, setiap perusahaan membangun sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap publik. Hal tersebut menjadi tugas komite audit untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan perusahaan berorientasi terhadap harapan publik, khususnya pemangku kepentingan yang paling berpengaruh. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI, 2016) menerbitkan POJK 04/2016, bahwa tujuan pembentukan komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Fungsi komite audit juga termasuk dalam memastikan perusahaan melakukan kewajibannya dalam mengungkapkan informasi berbasis *website*. Besarnya tugas dan tanggung jawab komite audit mengharuskan bagian komite audit harus berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya, dalam hal ini komite audit harus memiliki kompetensi keilmuan akuntansi dan keuangan.

Abdillah (2015) membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting disclosure*. Zulfikar dkk. (2019) membuktikan bahwa ukuran komite audit, frekuensi komite audit, dan keahlian komite audit di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi berbasis *website*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti telah membuat hipotesis penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

H3: Karakteristik Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

2.2.2.4 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

Berdasarkan teori legitimasi, setiap perusahaan membangun sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap publik. Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pemangku kepentingan sebab akan memberikan dampak yang besar baik dalam ketersediaan produk yang dihasilkan, peluang laba besar bagi investor, beban pajak bagi pemerintah, maupun dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini akan melihat ukuran perusahaan dari total aktiva. Penelitian terdahulu, yaitu Nurfadilah (2017), Abdullah dkk. (2017), Aminah dkk. (2021), Meinawati dkk. (2020), Satwika & Sari (2021), dan Suryanto (2019) menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi berbasis *internet*.

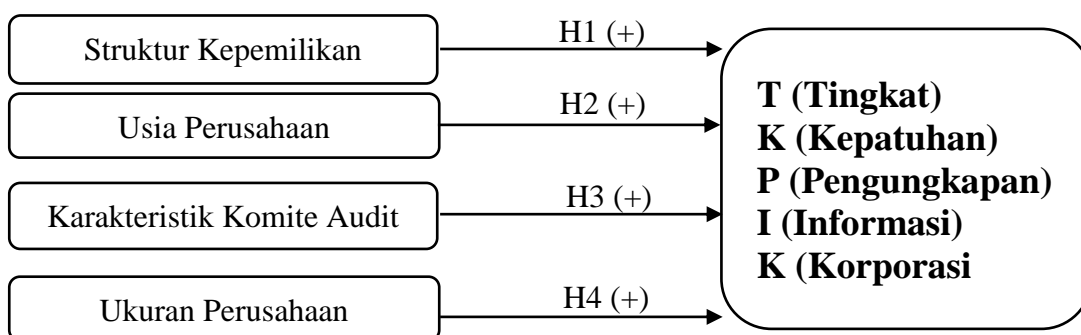
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti telah membuat hipotesis penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website*

2.3 Model Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Model Penelitian



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan melalui *internet*. Peneliti menelusuri laman resmi perusahaan terbuka sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 serta situs web Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan objek penelitian perusahaan segmen perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Penulis memilih pendekatan kuantitatif sebab mempertimbangkan yang dikemukakan oleh Arikunto (2013) tentang sifat penelitian kuantitatif, yaitu:

- 1) Unsur tujuan yang jelas, subjek, sumber data sudah baik, dan rinci
- 2) Penelitian dapat menggunakan sampel
- 3) Desain penelitian yang jelas
- 4) analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul
- 5) waktu yang relatif lebih singkat
- 6) pendanaan penelitian yang sedikit

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa informasi yang pada *website* resmi perusahaan segmen perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan data secara keseluruhan dalam suatu lingkup dan waktu yang ditentukan Sugiyono (2008). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021. *Internet Financial Reporting* pada *website* perusahaan segmen perdagangan, jasa, investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021. Populasi tersebut sesuai dengan daftar perusahaan pada penelitian Alvia dkk. (2022) yang terbagi menjadi delapan sub sektor sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Data Populasi dan Persebaran Sampel

Perusahaan Segmen Perdagangan, Jasa, dan Investasi Lainnya		
No	Sub-sektor:	Populasi
1	Perdagangan besar	47 Perusahaan
2	Perdagangan eceran	27 Perusahaan
3	Hotel, restoran, dan pariwisata	35 Perusahaan
4	<i>Advertising, printing, media</i>	19 Perusahaan
5	Kesehatan	7 Perusahaan
6	Perusahaan jasa komputer dan perangkat lainnya	10 Perusahaan
7	Perusahaan Investasi	9 Perusahaan
8	Perdagangan, jasa, dan investasi lainnya	10 Perusahaan
Jumlah		164 Perusahaan

sumber: <https://www.sahamok.net/emiten/sektor-bei/>
diolah oleh: peneliti

3.4 Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis dan penejelasan variabel variabel terkait, maka peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut:

$$WbDCi = \alpha + \beta_1PUB + \beta_2AGE + \beta_3ACE + \beta_4SIZ + e$$

Keterangan:

WbDCi : *Website-Based Disclosure Compliance Index*

α : *Constanta*

β : *Regression Coefficient*

PUB : *Ownership Structure*

AGE : *Company Age*

ACE : *Audit Committee*

SIZ : *Firm Size*

e : *Standard Error*

3.5 Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan tindakan mendefinisikan variabel berdasarkan konsep teori yang bersifat operasional sehingga variabel tersebut dipandang bersifat dapat diukur dan diuji oleh peneliti. Variabel penelitian merupakan *item* atau nilai yang melekat pada objek penelitian yang mempunyai variasi tertentu yang digunakan untuk diuji dan dipelajari untuk menghasilkan output atau kesimpulan yang berguna bagi pihak berkepentingan.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi dampak atas keberadaan variabel independen. Variabel dependen digunakan oleh peneliti untuk melihat dampak yang dihasilkan dari variasi tertentu variabel independen. Penelitian kali ini menggunakan variabel dependen dari hasil penelitian Alvia dkk. (2021), yaitu Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) berbasis *website*. Pengungkapan informasi berbasis *website* merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan melalui media digital berupa situs *web* resmi milik perusahaan terkait. Penilaian terhadap TKPIK dengan menggunakan *content analysis*, yaitu peneliti mengukur kelengkapan pada setiap *item* pengungkapan yang harus disajikan oleh perusahaan pada *website* resmi perusahaan, apabila *item* tersebut diungkapkan maka diberi skor 1, jika tidak mengungkapkan maka diberi skor 0. *Item-item* dalam penelitian oleh Alvia dkk. (2022) merupakan *item-item* yang dimuat pada POJK No. 8 tahun 2015, yaitu yang berisi *item-item* yang sekurang-kurangnya diungkapkan oleh perusahaan pada *website* resmi perusahaan terkait, meliputi informasi umum perusahaan tersebut, informasi bagi pemodal atau investor, informasi tata kelola perusahaan dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Skor maksimal apabila perusahaan melakukan pengungkapan lengkap berjumlah 31 *item* pengungkapan, dengan rumus perhitungan indeks sebagai berikut.

$$\text{TKPIK} = \frac{n}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang memiliki variasi tertentu yang diharapkan pada setiap variasi tersebut memiliki pengaruh atau menjadi sebab adanya variabel dependen. Penelitian kali ini menggunakan variabel independen mengenai karakteristik perusahaan dengan menggunakan empat variabel, meliputi struktur perusahaan, usia perusahaan, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan.

Definisi dan pengukuran menggunakan variabel-variabel independen tersebut sebagai berikut.

3.5.2.1 Struktur perusahaan (PUB)

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan kondisi kekuasaan yang terjadi pada perusahaan dimana setiap pemilik memiliki hak dalam memutuskan bagaimana perusahaan berjalan dan bereaksi terhadap fenomena. Konsentrasi kepemilikan dengan kepemilikan tersebar lebih diyakini dapat meningkatkan kebijakan pelaporan keuangan (Reverte, 2009). Selain struktur kepemilikan mencerminkan komposisi kepemilikan saham, konsentrasi struktur kepemilikan juga mencerminkan komitmen pemilik untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan (Nurfadilah, 2017).

Menurut Nurfadilah (2017) Struktur kepemilikan merupakan hal yang penting dalam menentukan nilai perusahaan. Pandangan terhadap struktur kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan kepemilikan oleh pihak dalam. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan.

Menurut Barakat dkk. (2020) pengaturan kepemilikan memiliki dampak eksplisit pada tingkat pengungkapan korporasi berbasis online. Apabila konsentrasi kepemilikan tersebut memiliki banyak pemangku kepentingan, maka tingkat keterbukaan informasi akan lebih besar.

Berikut ini indikator yang digunakan dalam variabel struktur kepemilikan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 2 Variabel Struktur Kepemilikan Perusahaan

Variabel	Indikator	Keterangan	Skala
Struktur Kepemilikan	Kepemilikan publik	Kepemilikan pihak eksternal	Rasio

3.5.2.2 Usia perusahaan (AGE)

Usia perusahaan yang dihitung dalam penelitian ini dimulai pada awal tercatatnya perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Menurut Umoren & Asogwa (2013), asosiasi positif didasarkan pada premis bahwa perusahaan berusia tua dan berpengalaman cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi sebab mereka telah menetapkannya dalam aturan perusahaan, dan sistem pelaporan dengan biaya yang efektif. Sebaliknya, asosiasi negatif berpremis bahwa perusahaan yang lebih muda mengungkapkan lebih banyak informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalisir adanya skeptis pada pemangku kepentingan.

Menurut Umoren & Asogwa (2013) usia perusahaan dihitung dengan cara:

- 1) Usia perusahaan = tahun penelitian - *first issue*
- 2) Usia perusahaan = tahun penelitian - tahun berdiri

Peneliti menggunakan perhitungan menurut Umoren dan Asogwa poin 2. Peneliti memilih perhitungan menggunakan poin 2 sebab lebih mengorientasikan usia sebenarnya dan menunjukkan seberapa lama pengalamannya dalam menjalankan sebuah perusahaan.

Tabel 3. 3 Variabel Usia Perusahaan

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Usia perusahaan	Tahun pendirian secara hukum (A)	Tanggal pendirian secara hukum di Indonesia	Lama tahun
	Tahun penelitian (B) Usia perusahaan	31 Desember 2021 sesuai <i>annual report</i> yang digunakan A – B	

3.5.2.3 Karakteristik Komite Audit (ACE)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance Republik Indonesia (KNKG RI) 2006, komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite audit.

Bursa Efek Indonesia saat itu bernama Bursa Efek Jakarta (2000) melalui Kep. Direksi BEI No. Kep-315/BEJ/06/2000 mendefinisikan, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Pada keputusan Kementerian BUMN RI (2002) Nomor: Kep-103/MBU/2002 menjelaskan yang pada intinya komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya beranggotakan satu orang komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN (secara umum dapat diartikan pegawai perusahaan itu sendiri atau anak perusahaan) yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

Secara umum, peneliti menyimpulkan bahwa komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang beranggotakan sekurang-kurangnya satu anggota dewan komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan itu sendiri yang memiliki fungsi berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan perusahaan guna menjaga efektivitas, efisiensi, ekonomis dalam kelangsungan perusahaan. Ukuran komite audit yang memadai menjadi hal yang penting untuk mitigasi masalah keuangan ataupun aktivitas perusahaan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor

khususnya mengenai pengungkapan korporasi berbasis *website* yang disajikan perusahaan sekurang-kurangnya sesuai POJK No. 8 tahun 2015.

Intensitas aktivitas komite audit akan mencerminkan karakteristik komite audit perusahaan tersebut. Pertemuan atau rapat komite audit menjadi aktivitas yang memiliki manfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan - termasuk pengawasan terhadap pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Frekuensi rapat komite audit dipengaruhi beberapa hal, diantaranya tugas, tanggung jawab, dan ukuran perusahaan (Zulfikar dkk., 2019).

Peraturan Bank Indonesia (2006) No. 8/4/PBI/2006 menyatakan, bahwa Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hal tersebut didasari atas fungsi komite audit dan tugas komite audit yang berhubungan erat dengan keahlian keuangan guna fungsi komite audit dapat berfungsi secara efektif dan diharapkan kinerja komite audit lebih baik - termasuk memastikan perusahaan melakukan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Zulfikar dkk. (2019) membuktikan bahwa ukuran komite audit, frekuensi komite audit, dan keahlian komite audit di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi berbasis *website*.

Keahlian komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan/atau akuntansi dibagi total anggota komite audit (Wan Mohammad dkk., 2018).

$$ACE = \frac{\text{jumlah anggota keahlian keuangan}}{\text{Total anggota komite}} \times 100\%$$

3.5.2.4 Ukuran perusahaan (SIZ)

Ukuran perusahaan merupakan skala ukuran yang mengklasifikasikan tingkatan setiap perusahaan apakah tergolong dalam jenis perusahaan kecil, perusahaan sedang, atau perusahaan besar. Pengukuran ini dilakukan dengan

menggunakan berbagai indikator. Suwito & Herawaty (2005) menjelaskan bahwa dalam penilaian ukuran perusahaan biasanya didasarkan pada indikator total aset yang dimiliki perusahaan. Stowe dkk. (2010) menjelaskan bahwa dalam menggolongkan ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan indikator total aset, jumlah penjualan pada periode tertentu, atau dari nilai pasar ekuitas yang dimiliki perusahaan.

Secara sederhana, ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai penentuan apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan kecil, atau besar. Suryanto (2019) ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan kecil, sedang, dan besar.

Adapun variabel yang digunakan dalam menentukan ukuran perusahaan beragam. Basyaib (2007) dalam Suryanto (2019) penentuan ukuran perusahaan menggunakan ukuran pendapatan, total aktiva, dan total modal. Stowe dkk. (2010) ukuran perusahaan diukur dari total aset, penjualan, atau dari nilai pasar ekuitas perusahaan. Menurut Nurfadilah (2017), pengertian ukuran perusahaan adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas dari suatu perusahaan dalam menilai apakah sebuah perusahaan digolongkan sebagai sebuah perusahaan kecil, atau besar melalui instrumen penghitungan dilihat dari nilai total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar.

Penelitian kali ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dengan indikator total aktiva perusahaan.

Tabel 3. 4 Variabel Ukuran Perusahaan

Variabel	Indikator	Keterangan	Skala
Ukuran perusahaan	Total aktiva	Total aktiva per 31 Desember 2021	Ordinal

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis deskriptif

Analisis deskriptif merupakan tindakan menilai setiap variabel penelitian dengan pengukuran deskriptif, yaitu nilai rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

3.6.2 Analisis uji asumsi klasik

Penelitian multivariabel ini menggunakan model regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai kemampuan prediksi yang akurat atau tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator*) dari model regresi yang akan dilakukan. Serangkaian pengujian asumsi klasik menurut Ghozali (2016) diantaranya:

3.6.2.1 Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah data residual variabel berdistribusi normal atau tidak. Data residual dikatakan berdistribusi normal apabila memenuhi dasar pengambilan keputusan, yaitu nilai probabilitas (Sig.) $> 0,05$, maka model regresi memenuhi normalitas.

3.6.2.2 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antarvariabel independen sebab akan mempengaruhi keakuratan perhitungan analisis. Antarvariabel independen dikatakan tidak memiliki korelasi apabila *variance inflation factor (VIF)* < 10 atau nilai toleransi $> 0,1$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi.

3.6.2.3 Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukannya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan baik apabila model regresi

tersebut yang homoskedastisitas dimana variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

3.6.3 Uji hipotesis

Pada pengujian hipotesis, dimana kali ini hipotesis terkait pembuktian apakah terdapat hubungan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan, peneliti menggunakan tiga alat analisis untuk serangkaian pengujian hipotesis, diantaranya:

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen.

3.6.3.2 Uji statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dapat dikatakan layak atau tidak. Pengujian ini menghasilkan nilai signifikansi pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan atau *error* (α) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi fit, sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak fit.

3.6.3.3 Uji T

Alat analisis Uji T merupakan alat analisis untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik inilah yang digunakan untuk menguji

hipotesis penelitian. Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan (secara parsial) terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

3.6.4 Model Regresi

Berdasarkan penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui hubungan antar variabel secara parsial dan simultan. Model regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi ini untuk membuktikan hubungan dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Peneliti merumuskan persamaan model penelitian sebagai berikut:

$$\mathbf{WbDCi} = \alpha + \beta_1\mathbf{PUB} + \beta_2\mathbf{AGE} + \beta_3\mathbf{ACE} + \beta_4\mathbf{SIZ} + e$$

Keterangan:

\mathbf{WbDCi} : *Website-Based Disclosure Compliance Index*

α : Constanta

β : Regression Coefficient

\mathbf{PUB} : Ownership Structure

\mathbf{AGE} : Company Age

\mathbf{ACE} : Audit Committee

\mathbf{SIZ} : Firm Size

e : *Standard Error*

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan, meliputi struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Informasi Korporasi (TKPIK) Berbasis *Website* berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap TKPIK (H1 tidak terdukung).
- 2) Usia perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TKPIK (H2 terdukung).
- 3) Karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap TKPIK (H3 tidak terdukung).
- 4) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TKPIK (H4 terdukung).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam proses penelitiannya, antara lain:

- 1) Penelitian ini berfokus pada satu sektor perusahaan yaitu perusahaan segmen perdagangan, jasa, dan investasi, sehingga tidak memberikan kesimpulan secara keseluruhan perusahaan terbuka di Indonesia.
- 2) Penelitian ini berlandaskan teori legitimasi sebagai landasan interpretasi hubungan perusahaan dengan masyarakat atas dasar perusahaan bagian dari masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku dan diharapkan oleh masyarakat.

- 3) Penelitian ini berfokus pada pencarian determinan TKPIK melalui sudut pandang karakteristik perusahaan dan memiliki kemampuan menjelaskan determinan TKPIK sebesar 11,8%, yang artinya terdapat faktor lain diluar variabel penelitian ini yang mempengaruhi TKPIK.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

- 1) Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jangkauan penelitian pada perusahaan segmen lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan hasil penelitian yang mampu mewakili seluruh perusahaan terbuka di Indonesia.
- 2) Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan landasan teori lain yang berhubungan dengan penelitian terkait. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan interpretasi dari landasan teori lain dan memberikan jawaban lain atas permasalahan dalam pencarian determinan rendahnya TKPIK.
- 3) Peneliti selanjutnya sebaiknya memperdalam penelitian ini dengan menambah variabel independen lingkup lainnya, seperti dari lingkup kinerja keuangan, CSR, dan lainnya. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi TKPIK sebesar 11,8%. Peneliti selanjutnya diharapkan mengambil dan/atau menambah variabel independen lingkup lainnya.
- 4) Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengukuran rasio karakteristik komite audit menggunakan rasio anggota komite audit berlatar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi terhadap ukuran perusahaan seperti total aset atau pendapatan untuk mengukur kemampuan anggota komite audit dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan ukuran perusahaan.
- 5) Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian terkait peranan OJK RI dalam penegakkan POJK No. 8 tahun 2015, termasuk pelaksanaan sanksi. Hal ini disebabkan oleh penelitian ini dan sebelumnya mengungkapkan bahwa adanya ketidakpatuhan perusahaan terbuka terhadap POJK No. 8 tahun 2015 yang bersifat wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2015). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 20–39.
- Abdullah, M. D. F., Ardiansah, M. N., & Hamidah, N. (2017). *The Effect of Company Size, Company Age, Public Ownership and Audit Quality on Internet Financial Reporting*. *SIJDEB* (Vol. 1, Nomor 2). <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/sijdeb>
- Agboola, A. A., & Salawu, M. K. (2012). *The Determinants of Internet Financial Reporting: Empirical Evidence from Nigeria*. *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN (Vol. 3, Nomor 11). Online. www.iiste.org
- Agustina, L. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Keuangan pada *Website* Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(2), 133–144.
- Akhtaruddin, M. (2005). *Corporate Mandatory Disclosure Practices in Bangladesh*. *International Journal of Accounting*, 40(4), 399–422. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.007>
- Al-Shammari, B. A. (2005). *Compliance with International Accounting Standards by Listed Companies in the Gulf Co-Operation Council Member States: An Empirical Study*. UWA Business School. University of Western Australia.
- Alvia, L., Susilowati, R. Y. N., & Farichah. (2022). Analisis Pengungkapan Informasi Berbasis Web pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia (Sebuah Studi Analisis Konten atas Implementasi POJK No. 8 Tahun 2015).
- Amalia, F., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1–11.
- Aminah, Amna, L. S., Khairudin, Meigiarti, S., & Rizal, S. (2021). Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 12(1), 30–42.

- Amri, N. F. (2021). Sekilas Mengenai Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*). e-akuntansi.com.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Aulia, L. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Website* Perusahaan *Go-Public* dalam Proses Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Potensial.
- Bank Indonesia. (2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- BAPEPAM RI. (2004). Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Baraqat, F. S. Q., Perez, M. V. L., Ariza, L. R., Barghouthi, O. A., & Islam, K. M. A. (2020). *The Impact Corporate Governance on Internet Financial Reporting: Empirical Evidence from Palestine. International Journal of Accounting & Finance Review*, 5(4). <https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijaf>
- Burhanudin, M., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 193. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.31856>
- Bursa Efek Jakarta. (2000). Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-315/BEJ/062000 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.
- Gandía, J. L. (2008). *Determinants of Internet-Based Corporate Governance Disclosure by Spanish Listed Companies. Online Information Review*, 32(6), 791–817. <https://doi.org/10.1108/14684520810923944>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Glaum, M., & Street, D. L. (2003). *Compliance with the Disclosure Requirements of Germany's New Market: IAS Versus US GAAP. Journal of International Financial Management and Accounting*, 14(1), 64–100.
- Gumanti, T. A. (2009). Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan. *Signaling Theory*. https://www.researchgate.net/publication/265652260_Teori_Sinyal_Dalam_Manajemen_Keuangan
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). *Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. Abacus*, 38(3), 317–349. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>
- Haninun, H., Lindrianasari, L., Sarumpaet, S., & Komalasari, A. (2019). *Does the Cost of Capital Affect Environmental Performance? Indonesian Journal of*

- Sustainability Accounting and Management*, 3(1), 14.
<https://doi.org/10.28992/ijsam.v3i1.68>
- Hasan, S., Hossain, S. Z., & Swieringa, R. J. (2010). *Corporate Governance and Financial Reporting Disclosures: Bangladesh Perspective*. *European Journal of Developing Country Studies*, 9, 20–47.
<http://www.researchgate.net/publication/277010363www.BellPress.org20>
- Ievgeniia, M., Yekateryna, R., Ushenko, N., Oksana, H., Sergii, T., & Natalia, Y. (2022). *Intellectual Capital as a Factor Forming Economic Security of Enterprises in Society 5.0*. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 269–277. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.25>
- Kementerian BUMN RI. (2002). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
- Kemp, S. (2022). DIGITAL 2022: INDONESIA. *Data Reportal*.
<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Khikmawati, I., & Agustina, L. (2015). Analisis Rasio Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan melalui *Internet* pada *Website* Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–8. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Khelif, H., Ahmed, K., & Souissi, M. (2017). *Ownership Structure and Voluntary Disclosure: A Synthesis of Empirical Studies*. *Australian Journal of Management*, 42(3), 376–403. <https://doi.org/10.1177/0312896216641475>
- KNKG RI. (2006). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. KNKG.
- Lestari, H. S., & Chariri, A. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan melalui *Internet (Internet Financial Reporting)* dalam *Website* Perusahaan.
- Meinawati, T., Suhendro, S., & Masitoh, E. (2020). Analisis Determinan Pengungkapan *Internet Financial Reporting* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 412–422. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.253>
- Muliati. (2013). Pengaruh *Resource*, Risiko dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Perusahaan. *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 87–94.
- Nair, R. R. (2002). *Internet for Information Services*. Ess Ess Publications.
- Nurfadilah. (2017). Pengaruh Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Rentabilitas, dan Ukuran Perusahaan pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar pada bursa Efek Indonesia. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- OJK RI. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- OJK RI. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Owusu-Ansah, S. (1998). *The Impact of Corporate Attributes on The Extent of Mandatory Disclosure and Reporting by Listed Companies in Zimbabwe*. *International Journal of Accounting*, 33(5), 605–631. [https://doi.org/10.1016/s0020-7063\(98\)90015-2](https://doi.org/10.1016/s0020-7063(98)90015-2)
- Oyelere, P., Laswad, F., & Fisher, R. (2003). *Determinants of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies*. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 14(1), 26–63.
- Prencipe, A. (2004). *Proprietary Costs and Determinants of Voluntary Segment Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies*. *European Accounting Review*, 13(2), 319–340. <https://doi.org/10.1080/0963818042000204742>
- Presiden RI. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Puri, D. R. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pelaporan Keuangan melalui *Internet*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 585–590.
- Reverte, C. (2009). *Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms*. *Journal of Business Ethics*, 88(2), 351–366. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9968-9>
- Rinta, M. (2021). Ukuran Dewan Direksi, Aktivitas Komite Audit dan Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 89–103. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1336>
- Rozak, A. (2012). Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham oleh Publik, *Leverage* dan Kelompok Industri terhadap Tingkat *Internet Financial Reporting (IFR)*. *Jurnal Computech & Bisnis*, 6(2), 101–112.
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). *The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies*. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212–226. <https://doi.org/10.1108/17471110910964496>
- Satwika, Y. D., & Sari, D. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing, Reputasi Auditor, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kelengkapan Informasi *Internet Financial Reporting*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 70–84.

- Sembiring, H. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 4(1), 68–77.
- Shkarlet, S., Dubyna, M., Shtyrkhun, K., & Verbivska, L. (2020). *Transformation of The Paradigm of The Economic Entities Development in Digital Economy*. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 16, 413–422. <https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.41>
- Siagian, G. E., & Ghozhali, I. (2012). Pengaruh Struktur dan Aktivitas *Good Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis secara Sukarela pada *Website* Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* (Vol. 1, Nomor 2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto, J. E., & Mcleavey, D. W. (2010). *Equity Asset Valuation*. John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (6 ed.). Alfabeta.
- Suryanto. (2019). *Effect of Internet Financial Reporting and Company Size on Stock Trading Volume at LQ45 Company in Indonesia Stock Exchange*. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(3), 527–533. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7378>
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII Solo*, 136–146.
- Umoren, A. O., & Asogwa, I. E. (2013). *Internet Financial Reporting and Company Characteristics: A Case of Quoted Companies in Nigeria*. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(12), 72–80. www.securities.com
- van der Laan Smith, J., Adhikari, A., & Tondkar, R. H. (2005). *Exploring Differences in Social Disclosures Internationally: A Stakeholder Perspective*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 123–151. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.007>
- Wan Mohammad, W. M., Wasiuzzaman, S., Morsali, S. S., & Zaini, R. M. (2018). *The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia*. *Journal of Asia-Pacific Business*, 19(1), 4–22. <https://doi.org/10.1080/10599231.2018.1419043>
- Zare, H., & Rajaeepur, S. (2019). *The Tasks of Social Workers Working with Children of Divorce: A Review*. *Journal of Management and Accounting Studies*, 1(04), 1–6. <https://doi.org/10.24200/jmas.vol1iss04pp1-6>

Zulfikar, R., Nofianti, N., & Faozy, A. N. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Karakteristik Komite Audit terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*. *Akuisisi Jurnal Akuntansi*, 15(2), 9–17. <http://dx.doi.org/10.24217>